



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kontrakan Segera Dilayangkan Surat

Terkait proyek VIP rawat inap

MUKOMUKO - Lantaran jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko melayangkan surat kepada pihak rekanan dan perusahaan penjamin. Ini terkait pekerjaan pembangunan ruangan rawat inap VIP senilai Rp 3 miliar lebih itu.

Surat dikirim agar pihak rekanan dan perusahaan penjamin menyelesaikan seluruh ketentuan yang sudah diatur. Ini sebagai resiko dari pekerjaan tidak tuntas dan terjadinya pemutusan kontrak.

"Tindakan kita atas temuan dari BPK itu, PPTK diperintahkan mengirim surat kembali pada pihak rekanan yang terkait. Jadi langsung

kita bikin surat," papar Direktur RSUD Mukomuko, H. Tugur Anjastiko.

Selain itu pihaknya juga akan berkoordinasi dan konsultasi dengan BPK. Langkah-langkah apa saja yang bisa ditempuh untuk mempercepat penuntasan temuan BPK tersebut. Karena, sebelumnya diklaim Anjas, pihaknya juga sudah layangkan surat yang sama menuntut pencairan uang jaminan pekerjaan.

"Memang sampai sekarang belum cair. Nanti kita surati lagi. Juga kita akan konsultasi pada BPK, bagaimana tindaklanjut seterusnya. Karena, saat putus kontrak kemarin langkah-langkah yang sudah diatur peraturan perundang-undangan, sudah kita tindaklanjuti," jelas Tugur.

Bahkan pihaknya sudah menda-tangi langsung kantor perusahaan

penjamin yang berada di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Tapi saat itu mereka belum bisa mencairkan. "Kini kita tunggu arahan berikutnya, apa langkah-langkah yang bisa kita ambil," tegas Tugur.

Temuan BPK atas pekerjaan pembangunan ruang rawat inap VIP itu terdapat dua poin. Pertama, jaminan pelaksanaan atas pekerjaan yang diputus kontrak belum dicairkan senilai Rp 163,08 juta. Kedua, pembangunan gedung itu berpotensi gagal kontruksi dengan nilai mencapai Rp 978,51 juta.

Terpisah, Inspektur Inpektorat Daerah Mukomuko, Sukiman, SP, mengatakan beberapa OPD sudah ada itikad baik untuk mengembalikan potensi kerugian negara ke kas daerah (Kasda) Pemkab Mukomuko.

Meskipun sudah ada itikad baik, jajarannya terus memaksimalkan pengawasan dan mengingatkan lagi kepada OPD-OPD yang bersangkutan. Karena, dalam pengembalian potensi kerugian negara dilakukan bertahap oleh OPD. Lalu ada pula OPD yang belum sama sekali mengembalikan potensi kerugian.

"Dinas Pertanian dan BKD sudah ada itikad baik dan mengembalikan ke Kasda. Pengembalian secara bertahap, karena dalam kegiatan barang dan jasa tersebut tidak satu rekanan, tetapi ada beberapa rekanan," terang Sukiman.

Disebutkan, masih ada waktu untuk menyelesaikan temuan tersebut. Tapi, hal tersebut harus segera mungkin diselesaikan. "Tidak harus tunggu waktu berakhir. Lebih cepat dikembalikan ke kasda akan lebih baik," demikian Sukiman. (hue)